KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Desak OKI Selamatkan Nasib Uighur
Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Desak OKI Selamatkan Nasib Uighur

DPR dan MUI Kecam Penyiksaan

JAKARTA-DPR RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam sikap pemerintah China yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnik Uighur yang minoritas muslim di Xinjiang. Bahkan, mereka mendesak pemirintah harus bersikap tegas untuk melakukan pembelaan.

"Kami mengecam sikap pemerintah China yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnik Uighur yang minoritas muslim di Xinjiang," ungkap Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12).

Menurut Abdul Kharis, ingin ada penelusuran fakta atas berita adanya pembatasan kelahiran etnik minoritas muslim di Xinjiang yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda 'memerangi terorisme'. "Apabila benar, maka ini menunjukkan pemerintah China terkesan mencap teroris terhadap etnik Uighur dan Muslim," ujarnya.

Kharis melanjutkan, hal kedua, dia menginginkan klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap Hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara. Pada 2015, Xinjiang juga telah mendobelkan pembayaran bagi pasangan Uighur yang memiliki anak lebih rendah dari kuota mereka sebesar 6000 yuan (950 dollar). Etnik China Han dipaksa pindah ke Xinjiang sejak 1776. Menurut sensus dari awal abad 19,75 persen penduduk Xinjiang adalah Uigur. Namun berdasar HRW (Human Rights Watch), diawal reformasi ekonomi China pada 1978, setelah pemaksaan KB, jumlah penduduk Uighur anjlok menjadi 42 persen. "Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah, serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia," tegas Abdul Kharis.

Diamini Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dia menyatakan, mendesak pemerintah untuk bersuara membela muslim Uighur. "Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminantif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China," kata Fadli, kemarin.

Menurut Fadli, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Politikus Gerindra itu, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun. "Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan," kata dia.

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengatakan, kejadian itu merupakan pelanggaran nyata HAM serta hukum internasional yang sama-sama menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. "Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya," ujar Din melalui keterangan tertulis, Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu juga meminta agar penindasan segera dihentikan. Dia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib mereka. "OKI harus selamatkan umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Tiongkok untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka," tegas dia.

Secara khusus, lanjutnya, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk bisa menyalurkan sikap masyarakat Islam dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah Tiongkok dan membela nasib umat di sana. "Kepada umat Islam dimbau untuk mengulurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan," tuntasnya. (aen)